

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, posisi geografis yang strategis, sumberdaya alam yang diyakini melimpah dan tradisi budaya yang tua dan kaya. Berbagai atribut yang dimiliki Indonesia ini juga mendorong munculnya sikap percaya diri akan nilai penting Indonesia, tidak hanya di lingkungan regional tetapi juga di pentas global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga ditengarai memiliki rasa “*entitlement*” atau setidaknya didahulukan sebagai “*primus inter pares*” dalam berhubungan dengan negara-negara sekawasan lainnya. Letak Indonesia yang strategis membuat negara ini rawan terhadap ancaman global, untuk meningkatkan pertahanan Indonesia harus peka terhadap ancaman-ancaman yang bisa merusak integrasi bangsa.

Pada era globalisasi dimana batas antar negara semakin tidak kentara, serta ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi signifikan pada terciptanya perspektif baru tentang dunia. Menurut Thomas Friedman, dalam bukunya “*The Lexus and the Olive Tree*”,¹ globalisasi sebagai suatu sistem internasional, bukanlah merupakan suatu proses yang bersifat statis, melainkan berkelanjutan, dinamis, yang mencakup integrasi pasar, negara

¹ Pidato Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional pada Semiloka Peranan Diplomasi Publik dan Otonomi Daerah di Era Globalisasi dan Kaitannya dengan Peningkatan Partisipasi Daerah dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI. Makasar, 14 Mei 2002.

bangsa (*nation-states*) dan teknologi, yang memungkinkan individu, korporasi dan negara-negara bangsa saling berinteraksi secara lebih jauh. Globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan telah menimbulkan dilema dalam memaknakan kedaulatan, sedangkan gerakan menuju integrasi regional telah melahirkan identitas baru yang tidak lagi sepenuhnya menempatkan negara sebagai acuan. Tidak kalah pentingnya, penekanan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara universal semakin mengurangi ke sakralan "*state security*" sebagai rujukan utama dalam hubungan internasional. Politik luar negeri, yang merupakan rangkaian kebijakan yang otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Suatu negara besar dengan kemampuan militer dan ekonomi yang kuat jelas akan memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dalam menjalankan politik luar negerinya dari pada suatu negara kecil yang lemah dan miskin. Dengan kata lain, "*national power capability*" sangatlah menentukan apakah suatu negara akan mampu menjadi subjek atau semata-mata menjadi objek yang selalu harus menyesuaikan diri dengan kehendak pihak yang lebih kuat dalam setiap interaksi internasional.² Untuk itu salah satu yang dibutuhkan Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya pada era globalisasi adalah para pelaksana kebijakan yang handal dalam menjalankan misi-misi diplomasi.

Sebagai analisis hubungan internasional penulis ingin memaparkan apa yang ada dibenaknya, dengan harapan dapat menjadi bahan bacaan dan telaah dalam

² *Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Dewi Fortuna Anwar. Disampaikan pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia XII (PNMHII XII). Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Oktober 2000.

menyikapi pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Diplomasi Indonesia Pada Era Globalisasi”**

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang metodologi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya dan khususnya pada diplomasi Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era globalisasi.
3. Mempelajari dan menjelaskan kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional dengan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dalam rangka pengembangan wawasan dan intelektual penulis.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam banyak hal karakter dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional tetaplah sama sejak apa yang dinamakan "Westphalian State" mulai muncul pada pertengahan abad ke 17. Hubungan internasional tetap didominasi oleh interaksi antar-negara yang memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing, terutama yang berkaitan dengan integritas wilayah, kedaulatan dan identitas nasional atau masalah pertahanan dan keamanan pada umumnya, yang biasanya dinamakan "*high politics*". Dalam berbagai hal dunia realist yang

bercirikan kompetisi tiada henti antar negara untuk memajukan kepentingan nasional masing-masing, termasuk melalui kekuatan militer, menunjukkan bahwa hubungan antar- bangsa pada dasarnya masih menunjukkan karakternya yang anarkis, yaitu yang kuat akan mendominasi atau memangsa yang lemah.³ Untuk mendamaikan beragamnya kepentingan negara-negara didunia maka usaha diplomasi tidak bisa lepas dari perpolitikan dunia. Kekuatan diplomasi suatu negara sangat menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, tidak jarang negara kecil dengan kemampuan diplomasinya yang pandai lebih maju dari negara yang besar tetapi tidak memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Di era globalisasi sekarang ini masuknya ancaman-ancaman terhadap integritas wilayah sangat terbuka lebar, tinggal bagaimana kekuatan negara dalam mempertahankannya.

Kinerja para elit dalam melakukan diplomasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melahirkan kecenderungan yang paradoksikal dalam formulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berganti antara rasa percaya diri dan kurang percaya diri, kemandirian dan ketergantungan, kebanggaan dan rasa malu. Seperti dikatakan Michael Leifer (1983), Indonesia terperangkap antara dua sikap yang kontradiktif, yaitu di satu pihak dihantui oleh kekhawatiran akan selalu adanya ancaman dari luar terhadap integritas nasional dan independensinya, dan di lain pihak keyakinan tentang klaim prerogatifnya terhadap kawasan disekitarnya. Baik Weinstein maupun Leifer, mensinyalir bahwa jurang antara aspirasi dan kemampuan untuk merealisasikannya yang

³ Lihat Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred Knopf, 1973 (5th edition), hal. 337.

cukup lebar tidak jarang melahirkan rasa frustrasi, terutama yang berkaitan dengan dilema ketergantungan ekonomi dan keinginan untuk mempertahankan independensi.⁴

Walaupun pengaruh lingkungan regional dan internasional tidak dapat diabaikan, para pengamat umumnya sepakat bahwa formulasi dan implementasi politik luar negeri Indonesia lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor internal daripada faktor eksternal. Menurut Weinstein setidaknya ada tiga fungsi utama politik luar negeri Indonesia, yaitu mempertahankan kemerdekaan nasional terhadap setiap kemungkinan ancaman dari luar, memobilisasi sumberdaya dari luar untuk kepentingan pembangunan ekonomi, dan terakhir untuk mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan kompetisi politik domestik.⁵ Sedangkan formulasi politik luar negeri Indonesia sangat ditentukan oleh pandangan dan sikap para elite yang saling berkompetisi satu sama lain. Namun juga disadari bahwa kebijakan politik luar negeri dan strategi diplomasi konvensional yang telah dikembangkan selama ini sudah tidak lagi memadai. Citra Indonesia yang terlanjur buruk berkaitan dengan berbagai kekacauan yang akhir-akhir ini terjadi tidak mungkin hanya diubah oleh jajaran diplomat ataupun kunjungan presiden dan pejabat negara lainnya ke luar negeri. Khusus yang berkaitan dengan perjuangan memperbaiki citra Indonesia di luar negeri tampaknya kita sangat membutuhkan strategi *public relations* yang lebih canggih.

⁴ Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence. From Sukarno to Suharto*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1976. Michael Leifer, *Indonesian Foreign Policy*. London: George Allen & Unwin, 1983. (*Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Dewi Fortuna Anwar. Disampaikan pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia XII (PNMHII XII). Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Oktober 2000)

⁵ F.B. Weinstein, "The uses of foreign policy in Indonesia. An approach to the analysis of foreign policy in the less developed countries". *World Politics* XXIV (3) April 1972. hal. 356-381.

Proses globalisasi yang terjadi sekarang ini berdampak pada semakin menipisnya peran negara bangsa. Berakhirnya abad ke-20, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Perang Dingin telah menimbulkan berbagai kesempatan dan peluang baru, tapi juga tantangan dan problema baru. Namun harapan semula akan segera terciptanya suatu tatanan dunia baru, suatu "*new world order*" yang lebih damai, adil dan sejahtera bagi semua, ternyata tidak terwujud. Sebaliknya, kenyataan menunjukkan bahwa untuk kurun waktu yang cukup lama masyarakat internasional akan dihadapkan pada apa yang dapat dilukiskan sebagai "*a new world disorder*", suatu keadaan dunia yang di samping mencatat kemajuan-kemajuan nyata masih sarat pula dengan konflik dan kemelut, ketidakadilan dan ketidakpastian. Maka kini kita memasuki suatu era yang ditandai oleh saling ketergantungan (*interdependensi*) antar-bangsa yang semakin mendalam, saling keterkaitan antar-masalah yang semakin erat, serta proses globalisasi, khususnya dalam perekonomian dunia, yang semakin menyeluruh, dipacu oleh kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai akibatnya, dunia terasa semakin menciut, batas-batas antar negara semakin kabur dan kaidah-kaidah seperti kedaulatan negara dan integritas teritorial semakin terkikis maknanya.

Proses reformasi yang mulai bergulir sejak pertengahan tahun 1998, telah memunculkan aktor-aktor baru dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hubungan dan politik luar negeri. Selain Pemerintah dan Parlemen, pendapat-pendapat dari kalangan organisasi politik dan kemasyarakatan, tokoh

masyarakat, tokoh agama, akademisi dan media massa tidak lagi dapat diabaikan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi semakin kompleks. Terlebih bila dikaitkan dengan masalah pengawasan dan akuntabilitas terhadap kinerja lembaga pemerintahan, Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, peran negara secara meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor-aktor nonteritorial, seperti perusahaan-perusahaan transnasional, gerakan-gerakan sosial transnasional, maupun organisasi-organisasi internasional.⁶ Hubungan internasional yang semakin kompleks menuntut digunakannya berbagai pendekatan baru di samping pendekatan diplomasi konvensional. Pola diplomasi yang kini berkembangpun tidak lagi semata-mata bertumpu pada jalur *first track diplomacy* yang bersifat formal antar-pemerintah, melainkan juga semakin sering terlaksana melalui jalur *second track diplomacy* yang bersifat informal non-pemerintah. Hal ini menimbulkan keharusan pada kita untuk lebih mengenali dan mendalami kiprah aktor-aktor non-pemerintah tersebut. Masyarakat luas perlu diajak untuk ikut memainkan peran dalam meningkatkan citra Indonesia di lingkungan internasional, Proses globalisasi telah membuat peranan masyarakat semakin mengemuka dalam proses pembuatan keputusan, yang terkait dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri, sehingga peranan mereka sebagai aktor-aktor baru dalam hal ini tidak dapat diabaikan, bahkan perlu di kembangkan sebagai pelaku diplomasi di luar jalur formal mengingat dengan perkembangan yang ada, diplomasi tidak

⁶ (Budi Winarno, Kompas, 19 Mei 2004, *Akhir Negara Bangsa dan Kematian Demokrasi*).

dapat lagi dilakukan oleh para diplomat dalam pengertian formal semata. Adanya dukungan masyarakat dalam politik luar negeri menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan diplomasi.

Keturutsertaan kelompok-kelompok di luar pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi bukan berarti bahwa tanggung jawab diplomat menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya sekarang diplomat harus menguasai semakin banyak bidang permasalahan yang menjadi agenda internasional serta harus mampu menjalin komunikasi dengan komunitas internasional yang lebih luas di luar kalangan birokrat dan diplomat lainnya. Peningkatan profesionalisme bagi para diplomat merupakan kebutuhan yang cukup mendesak mengingat selama ini banyak kritik tentang lemahnya kemampuan diplomasi Indonesia sehingga citra negeri ini begitu terpuruk. Para diplomat tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang isu-isu regional dan internasional, tetapi juga harus menguasai permasalahan di dalam negeri serta menghayati visi dan misi nasional yang hendak diperjuangkan di lingkungan regional dan global, karena Politik Luar Negeri suatu negara pada dasarnya merupakan perpaduan dan refleksi dari perkembangan situasi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Hal ini juga berlaku bagi politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, antara lain posisi geografisnya yang strategis yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografinya; serta sistim sosial politiknya; yang sangat

mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara bangsa kita dalam memposisikan diri dalam pergaulan antar- bangsa.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan: *Bagaimana pelaksanaan diplomasi Indonesia pada era globalisasi?*

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar penulisan pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan permasalahan diatas, penulis akan menggunakan teori-teori yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih oleh penulis. Adapun kerangka dasar pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

1. Diplomasi

Definisi diplomasi dalam Oxford English Dictionary menyebutkan:

*"The management of international relations by negotiation." "The method by which these relations are adjusted and managed."*⁷

Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to diplomatic practice* mengatakan diplomasi adalah *"The application of intelligence and tact to conduct*

⁷ Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, 1967, hal. 163

of official relations between the governments of independent states."⁸ (penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat).

Pengertian diplomasi hampir sama dengan politik luar negeri, politik luar negeri menetapkan tujuan dan sasaran, sementara diplomasi mencakup sarana dan mekanisme untuk mencapai sasaran dan tujuan dari politik luar negeri di luar batas wilayah yurisdiksi. Diplomasi merupakan instrumen penting dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam banyak hal diplomasi yang erat kaitannya dengan hubungan antar negara memberikan suatu peranan yang besar dalam pemeliharaan perdamaian dengan mengedepankan seni negosiasi, pentingnya diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional sangat mengikat dalam hubungan internasional, seperti yang nyatakan oleh Morgenthau suatu pra-kondisi bagi penciptaan dunia yang damai adalah berkembangnya konsesus internasional baru yang memungkinkan diplomasi mendukung "*peace through accommodation*" (damai melalui penyesuaian)⁹. Kissinger juga menunjukkan bahwa diplomasi berperan penting dalam penyesuaian perbedaan-perbedaan antara bangsa-bangsa. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu *Acquisition* (perolehan), *Preservation* (pemeliharaan), *Augmentation* (penambahan), dan *Proper Distribution* (pembagian yang adil).¹⁰

Tugas diplomasi yang meliputi keseluruhan jajaran politik luar negeri adalah, (1) diplomasi harus menetapkan tujuan-tujuannya berdasarkan kekuatan

⁸ Ibid, hal. 164

⁹ S.L Roy, *Diplomacy*, Diterjemahkan oleh Harwanto, Mirsawati, Jakarta, 1995, hal. 23.

¹⁰ Ibid, hal. 6.

yang sesungguhnya. (2) diplomasi harus menilai tujuan-tujuan negara lain. (3) Diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuannya. (4) Diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuannya.¹¹ Dalam pelaksanaan diplomasi sarana yang sangat menentukan diantaranya adalah Bujukan (*persuasion*), Kerja sama (*Compromise*), dan Ancaman kekerasan (*Threat of force*). Ancaman kekerasan atau perang adalah tindakan terakhir dari diplomasi bila diplomasi gagal meraihnya dengan jalan damai.

Proses globalisasi dan reformasi telah membuat peranan masyarakat semakin mengemuka dalam proses pembuatan keputusan, yang terkait dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri. Krisis ekonomi dan politik di Indonesia, dimana masyarakat Indonesia yang dulu terkenal toleran dan ramah kini semakin menunjukkan gejala kebengisan dan fanatisme dengan terjadinya berbagai aksi terorisme, serta kekerasan bernuansa SARA (suku, ras, agama, antar-golongan) dan ketidakpatuhan pada hukum. Berbagai konflik komunal yang terjadi serta suasana tidak berhukum (*lawlessness*) pada umumnya sangat menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional dan menyurutkan minat investor yang ingin investasi di Indonesia, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi.

Berbagai masalah yang melanda Indonesia beberapa tahun terakhir menjadikan Indonesia negara yang banyak mendapat perhatian kalangan internasional, yang berdampak pada buruknya citra Indonesia diluar negeri. Untuk mengatasi citra yang buruk di luar negeri dan meyakinkan masyarakat dunia,

¹¹ Lihat Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred Knopf, 1973 (5th edition), hal. 296.

pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari diplomasi sebagai instrument penting dalam pergaulan internasional. Upaya diplomasi harus dilakukan untuk meraih, memperkuat dukungan internasional serta mengembalikan citra Indonesia yang telah mendapat perhatian masyarakat internasional.

Ditengah situasi Indonesia yang semakin kompleks menuntut digunakannya berbagai pendekatan baru di samping pendekatan diplomasi konvensional. Pola diplomasi yang kini berkembangpun tidak lagi semata-mata bertumpu pada jalur *first track diplomacy* yang bersifat formal antar-pemerintah, melainkan juga semakin sering terlaksana melalui jalur *second track diplomacy* yang bersifat informal non-pemerintah. Hal ini menimbulkan keharusan pada pemerintah untuk melibatkan peran masyarakat luas dalam meningkatkan citra Indonesia di lingkungan internasional.

2. Politik Luar Negeri

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

*Foreign Policy is strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest*¹².

Dari defenisi diatas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat kebijakan suatu negara terhadap lain atau lembaga internasional yang ditujukan untuk

¹² Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1969, p.127.

mencapai tujuan khusus yang didefinisikan dalam istilah kepentingan nasional. Disini terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri, yaitu: strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Politik luar negeri secara umum adalah "*the goals that official's representations states seek abroad, the values that underline those goals, and the means or instruments used to pursue them*".¹³ Jadi ketika berbicara mengenai politik luar negeri, tercakup didalamnya beberapa hal seperti: tujuan yang ingin dicapai, nilai-nilai yang mendasari tujuan tersebut, dan cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di era krisis multidimensional dewasa ini, politik luar negeri ditujukan untuk membantu program pemulihan ekonomi, terutama untuk menarik investasi dari luar serta mendapatkan peluang pasar untuk ekspor; menghadapi berbagai ancaman separatisme politik luar negeri memainkan peran penting untuk mencegah internasionalisasi isu-isu ketidakpuasan daerah dan untuk menegaskan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia; menghadapi perpecahan, baik di antara sesama elit maupun antar golongan masyarakat, politik luar negeri dapat berfungsi sebagai perekat dengan menciptakan suatu visi bersama yang hendak diperjuangkan di arena regional dan internasional; politik luar negeri dipakai sebagai alat untuk membangkitkan rasa harga diri dan kebanggaan bangsa yang sekarang seolah sudah redup. Terakhir, politik luar negeri harus tetap mampu mendorong terciptanya keamanan dan stabilitas

¹³ Harwanto Dahlan, *Politik Luar Negeri*, Handout Pengantar Ilmu HI, Jur. Ilmu HI, Fisipol, UMY, 2000, hal. 1.

regional serta hubungan kerjasama yang erat dengan dunia internasional, terutama di lingkungan ASEAN.

3. Teori Pengambil Keputusan

Setiap mengambil keputusan selalu mempertimbangkan untung rugi dalam mengambil kebijaksanaan. Disamping itu, para pembuat keputusan sebagai actor yang rasional juga mempertimbangkan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Bahwa pengambil keputusan, disadari atau tidak memiliki pendapat tentang, prioritas nilai dan konsepsi tentang sarana yang dipunyai dan tujuan tersebut.¹⁴

Menurut James E. Dougherty, pengambil keputusan dapat diasumsikan sebagai berikut:

*"The decision-maker make his decision within a total perceived environment which includes the salient features of his national political system and of the international system as a whole thus decision-making theory is linked to system theory, and micro is joined to macro, through the perception of the decision maker, who presumably is a ware of his existence at various concentric systematic level."*¹⁵

Sedangkan dalam pembuatan keputusan kebijaksanaan luar negeri atau foreign policy, William D. Coplin berasumsi:

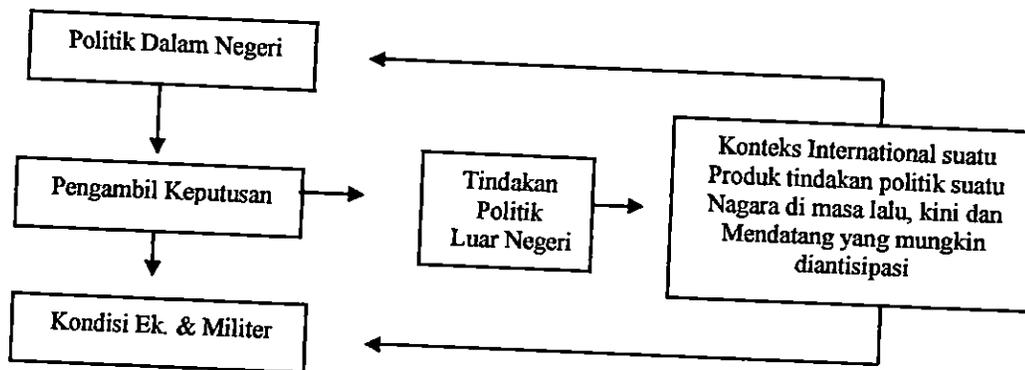
¹⁴ Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Cetakan I. LP3S, Jakarta, 1990, hal 163.

¹⁵ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff, Jr, *Politik Internasional*, diterjemahkan oleh M. Amien Rais, Fisipol UGM.

“Dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pembuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. *Pertama*, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. *Kedua*, kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan / keamanan. *Ketiga*, konteks internasional, (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi).”¹⁶

Untuk lebih jelasnya interaksi dari ketiganya dapat di ilustrasikan dalam bagan sebagai berikut yang menghasilkan kebijaksanaan luar negeri.

Gambar Teori Pengambil Keputusan Menurut William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Internasional Suatu Telaah Teoritis, Bandung. Sinar Baru, Edisi kedua, 1992

¹⁶Djumadi M. Anwar, *Diktat III politik Luar Negeri Indonesia*, Jur. Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999, hal. 22.



Dari gambar tersebut terlihat kaitan-kaitan antara politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer dan konteks internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan tindakan politik luar negeri suatu negara.

Kondisi politik Indonesia sedang mengalami krisis sejak lengsernya soeharto 1998, berbagai peristiwa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, salah satunya Issu terorisme internasional di Indonesia yang melibatkan beberapa kalangan muslim indonesia telah banyak merugikan bangsa Indonesia baik secara materil maupun non materil. Indonesia pernah mendapat julukan sebagai negeri sarang terorisme. Terjadinya berbagai peristiwa pengeboman di wilayah Indonesia terutama terjadinya peristiwa bom Bali 12 oktober 2002 dan wilayah lain di Indonesia hingga terjadinya bom Kuningan 2004, sehingga muncul pendapat internasional yang menganggap Indonesia sarangnya teroris. Pemerintah Indonesia pun harus melakukan berbagai upaya pendekatan terhadap negara lain agar dapat mengubah persepsi internasional terhadap bangsa Indonesia, karena dengan adanya pandangan yang miring terhadap Indonesia akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara lain yang nantinya akan mempersulit pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam konsep kepentingan nasional. Maka para pembuat kebijakan Indonesia harus dapat memperbaiki citra bangsa Indonesia dimata internasional melalui kebijakan-kebijakan luar negeri.

F. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Untuk itu jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada topik pembahasan mengenai diplomasi Indonesia pada era globalisasi, terutama pada kebijakan-kebijakan eksternal, dari tahun 1998 – 2004, karena lemahnya kondisi Indonesia pada masa itu dan sebagai negara yang sedang dilanda berbagai krisis multidimensi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literature, majalah, jurnal, tabloid, *surfing* dan *browsing* internet serta dari sumber-sumber lain yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

Bab II. Perkembangan Politik Luar Negeri dan Diplomasi RI.

Bab ini berisi penjelasan tentang perkembangan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia, yang membahas mengenai dinamika politik luar negeri pada masa pemerintahan orde lama – era reformasi serta perkembangan regional dan internasional pada masa transisi demokrasi.

Bab III. Pemulihan Citra Indonesia di Mata Masyarakat Internasional.

Bab ini memberikan penjelasan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam pemulihan citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional, pada masa transisi demokrasi.

Bab IV. Peningkatan Hubungan Kerjasama Ekonomi Internasional.

Bab ini memberikan penjelasan mengenai peningkatan hubungan kerjasama ekonomi internasional, dengan prioritas pada negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Bab V. Penutup.

Merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penulisan ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.